https://yptb.org/index.php/educurio | e-Mail: jurnalq17@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.71456/ecu.v5i1.2966
p-ISSN: 2984-6146 | e-ISSN: 2963-0339

PERSEPSI MAHASISWA PPKN UNIMED TERHADAP PROGRAM SEKOLAH RAKYAT DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI KELUARGA MISKIN

Unimed Pancasila and Civic Education Students' Perceptions of the Sekolah Rakyat Program in Promoting Educational Equity for Low-Income Families

Submit Tgl.: 11-Oktober-2026 Diterima Tgl.: 05-November-2026 Diterbitkan Tgl.: 06-November-2026

Agnes Elizabeth Manalu[1*], Nabila Devia Hummaira[2], Anisa Amelia Purba[3], Mikha Valdo Tambunan[4], Nur cahyu Azizah[5], Saqinah Aifi Kirmala[6], Chandra Fhutu Neva[7], Sri Yunita[8],

*[1-8] Universitas Negeri Medan

*email:
agnesmanalu137@gmail.com,
nabiladeviahummaira@gmail.com,
purbaanisaamelia@gmail.com,
valdotambunan101005@gmail.com,
nurcahyuazizah@gmail.com,
saifikirmala@gmail.com,
chandraneva@unimed.ac.id,
sr.yunita@unimed.ac.id

Abstrak

Hak atas pendidikan sudah dijamin konstitusi, tetapi kesenjangan akses masih dirasakan keluarga miskin. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi afirmasi. Penelitian ini menganalisis persepsi mahasiswa PPKn UNIMED terhadap program tersebut dengan Teori Persepsi Sosial Jerome Bruner. Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap mahasiswa PPKn yang dipilih secara *purposive sampling*. Hasilnya, mahasiswa menilai program ini relevan untuk menekan angka putus sekolah dan mengurangi kesenjangan. Namun, penerimaan ini tidak bulat. Sebagian mahasiswa menilai pelaksanaannya masih jauh dari harapan karena fasilitas pendidikan memprihatinkan dan masih banyak anak kurang mampu yang tetap putus sekolah. Mahasiswa juga mengkhawatirkan akurasi data penerima, potensi praktik orang dalam dalam seleksi, kualitas guru, dan penyalahgunaan anggaran. Persepsi ini terbentuk dari faktor struktural seperti sumber informasi, serta faktor fungsional seperti nilai konstitusional, pengalaman pribadi, dan ekspektasi terhadap pemerintah. Pemerintah disarankan memperkuat transparansi dan pengawasan, terutama pada proses seleksi dan penyaluran dana. Pemerintah juga perlu memperluas jangkauan sekolah di wilayah 3T serta meningkatkan kualitas pengajar dan sarana pendukung. Evaluasi rutin yang melibatkan masyarakat harus dilakukan agar program tidak berhenti pada pencapaian administratif semata.

Kata Kunci:
Persepsi Mahasiswa, Program Sekolah Rakyat, Pemerataan Pendidikan

Keywords:
Student Perception, Sekolah Rakyat Program, Education Equity

Abstract

The right to education is constitutionally guaranteed, yet access inequality persists for poor families. The Sekolah Rakyat program was launched as an affirmative solution. This study analyzes the perceptions of PPKn UNIMED students toward the program using Jerome Bruner's Social Perception Theory. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through interviews with PPKn students selected via purposive sampling. The results show that students view the program as relevant for reducing dropout rates and bridging educational gaps. However, acceptance is not uniform. Some students argue that its implementation remains far from ideal due to poor educational facilities and the continuing dropout of underprivileged children. Students also raised concerns about data accuracy, potential insider practices in selection, teacher quality, and budget misuse. These perceptions are shaped by structural factors such as information sources, and functional factors such as constitutional values, personal experiences, and expectations of the government. The government is advised to strengthen transparency and supervision, especially in the selection process and fund distribution. The government also needs to expand school coverage in 3T regions and improve the quality of teachers and supporting facilities. Routine evaluations involving the community must be conducted so the program does not stop at administrative achievements..

Cara mengutip Manalu, A. E., Hummaira, N. D., Purba, A. A., Tambunan, M. V., Azizah, N. cahyu, Kirmala, S. A., Neva, C. F., & Yunita, S. (2026). Persepsi Mahasiswa PPKn Unimed terhadap Program Sekolah Rakyat dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin. *EduCurio: Education Curiosity*, *5*(1), 554–563. https://doi.org/10.71456/ecu.v5i1.2966

Copyright © 2026: Agnes Elizabeth Manalu, Nabila Devia Hummaira, Anisa Amelia Purba, Mikha Valdo Tambunan, Nur cahyu Azizah, Saqinah Aifi Kirmala, Chandra Fhutu Neva, & Sri Yunita.

PENDAHULUAN

Sudah seharusnya akses pendidikan didapatkan secara merata oleh seluruh warga negara karena pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin secara konstitusional dalam sistem hukum Indonesia (Sulubara, Basri, & Iskandar, 2024). Landasan yuridis hak atas pendidikan dengan tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa "*Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*". Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh pendidikan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri, dan meningkatkan kualitas hidup (Hasanah, 2022). Ketentuan hukum tersebut kemudian dijalankan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*". Landasan yuridis ini secara tegas menyatakan negara memiliki kewajiban hukum dan moral untuk memastikan bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk mereka dari keluarga miskin, yang tidak terhalang mengakses pendidikan akibat keterbatasan ekonomi (Widyaningtyas & Subroto, 2023).

Kesenjangan dalam akses pendidikan di Indonesia bukanlah isu baru, melainkan masalah struktural yang butuh perhatian serius dan harus terus dibenahi. Meskipun secara tertulis landasan yuridis hak atas pendidikan di Indonesia telah diatur secara komprehensif, namun hingga saat ini realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan belum dirasakan sepenuhnya oleh warga negara, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Banyak anak dari keluarga ekonomi kurang mampu yang terpaksa putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan ekonomi terhadap beban biaya pendidikan.

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program strategis bernama Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif pendidikan berasrama yang gratis dari jenjang dasar hingga menengah yang dikhususkan bagi peserta didik dari keluarga miskin berdasarkan desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/DTSEN (Daniel S & Juhaeriah, 2025). Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan akses belajar, tetapi juga menjamin pemenuhan kebutuhan dasar siswa seperti asrama, makan, dan seragam, sehingga beban ekonomi orang tua tidak lagi menjadi penghalang bagi masa depan pendidikan anak (Mahrowi, 2025).

Hadirnya Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dalam pendidikan, menghadirkan kesempatan belajar bagi anak-anak khususnya dari keluarga kurang mampu, serta menjadi wujud komitmen negara dalam mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial, sejalan dengan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun program sekolah rakyat menawarkan solusi struktural bagi masalah kemiskinan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada bagaimana kebijakan ini diterima dan dipahami oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa calon pendidik. Melalui dinamika tersebut, pandangan masyarakat berguna sebagai parameter utama untuk menilai penerimaan sosial sekaligus efektivitas komunikasi kebijakan pemerintah (Sari, Permadi, Sandiza, & Sartika, 2025).

Pemahaman mengenai persepsi dapat dianalisis melalui Teori Persepsi Sosial Jerome Bruner (1957) yang menekankan bahwa persepsi bukanlah proses pasif, melainkan aktif dan selektif. Menurut Bruner, individu secara aktif menginterpretasikan stimulus berdasarkan

harapan, pengalaman masa lalu, nilai, budaya, dan kebutuhan yang relevan bagi dirinya (Bruner, 1957). Dalam artikel legendaris karangan Bruner yang berjudul *On Perceptual Readiness* menjelaskan bahwa persepsi terhadap suatu objek atau kebijakan, dalam konteks ini Program Sekolah Rakyat dipengaruhi oleh faktor fungsional (seperti motivasi, emosi, dan pengalaman pribadi) serta faktor struktural (informasi yang diterima tentang program tersebut) (Rahmadini, 2025). Dengan demikian, respons kritis mahasiswa PPKn dalam mempersepsikan Program Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh informasi objektif tentang program, tetapi juga oleh kerangka berpikir (*frame of reference*), latar belakang sosial ekonomi, dan nilai-nilai kewarganegaraan yang dimiliki.

Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Universitas Negeri Medan (UNIMED) memiliki peran penting sebagai *agent of change* dalam dunia pendidikan yang akan mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan serta keadilan social, baik di masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Sebagai generasi muda yang kritis, persepsi yang diberikan secara objektif dan kontekstual terhadap Program Sekolah Rakyat merefleksikan sejauh mana program ini berjalan efektif dalam menuntaskan masalah kesenjangan pendidikan di Indonesia. Pemahaman calon pendidik ini tidak hanya sebatas mengetahui program, melainkan mampu melihat ketepatan sasaran program, realisasi program tersebut apakah hanya sebatas narasi atau mampu membawa perubahan bagi pemerataan pendidikan di Indonesia khususnya bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang pendidikan nasional (Rahmawati, Daryono, & Firmansyah, 2026).

Kajian akademis mengenai persepsi mahasiswa terhadap Program Sekolah Rakyat dengan pendekatan Teori Bruner masih sangat minim. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan dilakukan oleh Reza Darna Yanda, dkk pada tahun 2026 yang berjudul "Persepsi Mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang terhadap Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG)". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan yang baik mengenai MBG, tetapi tetap bersikap kritis terhadap aspek pelaksanaan, pengawasan, anggaran, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan program (Yanda & dkk, 2026).

Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji persepsi mahasiswa PPKn terhadap kebijakan pemerintah, penelitian tersebut berfokus pada program pemenuhan gizi, sedangkan penelitian ini berfokus pada Program Sekolah Rakyat sebagai kebijakan baru pemerintah yang berfokus pada pemerataan pendidikan bagi keluarga miskin. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Persepsi Sosial Jerome Bruner untuk menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa PPKn UNIMED terhadap program sekolah rakyat. Pemahaman ini penting untuk mendukung sosialisasi dan keberhasilan program, sekaligus sebagai refleksi atas kesadaran mahasiswa terhadap hak konstitusional warga negara atas pendidikan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa PPKn UNIMED terhadap Program Sekolah Rakyat dilihat dari perspektif Teori Persepsi Sosial Jerome Bruner. Fokus kajian ini adalah untuk memahami bagaimana mahasiswa mempersepsikan relevansi program ini dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan bagi keluarga miskin, serta faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap isu-isu kebijakan publik terkini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat memahami dengan lebih dalam tentang pandangan dan pengalaman mahasiswa PPKn di Universitas Negeri Medan terhadap topik yang diteliti. Informan dipilih dengan cara purposive sampling, yaitu

Copyright © 2026: Agnes Elizabeth Manalu, Nabila Devia Hummaira, Anisa Amelia Purba, Mikha Valdo Tambunan, Nur cahyu Azizah, Saqinah Aifi Kirmala, Chandra Fhutu Neva, & Sri Yunita.

mahasiswa PPKn yang dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan struktur sebagian, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi berdasarkan pengalaman dan pendapat dari narasumber, serta bisa mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang diberikan. Data dari wawancara selanjutnya diproses dengan beberapa tahapan yaitu mengkondensasi data, menyajikan data, serta menarik dan memverifikasi kesimpulan. Pengecekan kebenaran data dilakukan dengan cara membandingkan informasi dari beberapa sumber informan. Metode ini sesuai dengan penelitian (Wiratomo & dkk, 2025) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk meneliti bagaimana mahasiswa memandang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selain itu, penelitian (Zalmi & Montessor, 2022) yang menggunakan teknik purposive sampling, wawancara, serta analisis data berdasarkan pendekatan Miles dan Huberman dalam studi tentang PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data diperoleh melalui wawancara dengan sembilan mahasiswa Program Studi PPKn UNIMED dari tiga angkatan. Identitas informan disamarkan dengan kode A1-A3 (angkatan 2023), B1-B3 (angkatan 2024), dan C1-C3 (angkatan 2025). Hasil disajikan menurut dua rumusan masalah: (A) persepsi mahasiswa terhadap relevansi Program Sekolah Rakyat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan bagi keluarga miskin, dan (B) faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan persepsi tersebut

Persepsi Mahasiswa terhadap Relevansi Program Sekolah Rakyat

Relevansi program dianalisis melalui empat indikator, yaitu relevansi tujuan dan kebutuhan, relevansi sasaran, relevansi hasil, dan hambatan relevansi.

1. Relevansi Tujuan dan Kebutuhan

Seluruh informan memahami Sekolah Rakyat sebagai program pemerintah untuk anak dari keluarga kurang mampu. Beberapa informan menekankan bahwa inisiatif ini tidak hanya memberikan pendidikan, namun juga memenuhi kebutuhan dasar para siswa. A2 mengungkapkan bahwa program ini menyediakan akomodasi, fasilitas, dan kebutuhan siswa, sementara C3 menyebutnya sebagai sekolah gratis yang berbasis asrama yang menangani biaya pendidikan beserta biaya hidup.

Sebagian besar informan berpendapat bahwa program ini telah memenuhi prinsip ketersediaan dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. A3 percaya bahwa aksesibilitas sudah cukup baik karena kebutuhan siswa didukung oleh negara, sedangkan C1 menyoroti adanya infrastruktur dan fasilitas yang mencukupi tanpa memerlukan biaya. C3 mengaitkan hal ini dengan tugas "mencerdaskan kehidupan bangsa" yang tertuang dalam UUD 1945.

Evaluasi tersebut juga menyertakan catatan tentang ketersediaan. A2 dan A3 mengungkapkan bahwa jumlah sekolah dan kapasitas siswa masih terbatas sehingga belum dapat menjangkau semua anak yang memerlukan. B1 menyatakan bahwa penilaiannya didasarkan pada gambaran umum program, bukan pada pelaksanaan yang ia ketahui dengan jelas.

2. Relevansi Sasaran

Ketepatan sasaran menjadi isu yang paling banyak disoroti. Para informan sepakat bahwa seleksi sebaiknya dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dan dilakukan secara terbuka serta jelas (B1, B2, B3, C2). Beberapa kekhawatiran muncul, antara lain:

- data penerima yang tidak akurat atau ketinggalan zaman (A1, A3). A3 mencurigai masih ada keluarga kurang mampu yang belum tercatat;

- praktik "orang dalam" dalam proses seleksi (B2);
- individu yang mengaku miskin tetapi sebenarnya mampu (C2);
- peran pemerintah daerah dalam proses seleksi siswa (C1).

C3 memberikan perspektif yang lain. Ia mengetahui bahwa calon siswa disurvei langsung di rumah mereka sehingga kemungkinan akurasi penentuan sasaran cukup tinggi, tetapi ia belum bisa menilai keadilan karena jumlah sekolah di area dengan tingkat kemiskinan tinggi di sekitarnya masih sangat terbatas.

3. Relevansi Hasil

Sebagian besar informan berpendapat bahwa inisiatif ini memiliki potensi untuk mengurangi tingkat putus sekolah. B2 menyatakan bahwa faktor ekonomi sering menjadi penyebab utama putus sekolah, sedangkan program ini menanggung biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. C3 bahkan meyakini bahwa program ini bisa mengurangi, bahkan berpotensi menghapuskan, angka putus sekolah di kalangan keluarga yang kurang mampu. Namun, C2 merasa bahwa meskipun konsep program ini bagus, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal karena ia masih melihat banyak anak yang terpaksa putus sekolah akibat masalah ekonomi. B1 memilih untuk tidak memberikan penilaian yang pasti mengenai efektivitas, hanya menyatakan bahwa program ini memiliki potensi.

Seluruh informan setuju bahwa program ini bisa membantu mengurangi kesenjangan dalam pendidikan. B2 berpendapat bahwa kesenjangan semakin mengecil karena anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan pendidikan sekarang bisa bersekolah. C2 menjelaskan bahwa siswa kini mendapatkan fasilitas, pengetahuan, dan pengajar yang setara dengan anak-anak dari latar belakang yang lebih mampu, dan C3 menambahkan bahwa pemilihan guru yang ketat dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dari sudut pandang Sila Kelima Pancasila, sebagian besar narasumber melihat bahwa program ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial (B2, C1). B3 dan C3 menilai program ini positif, namun bisa menjadi solusi sementara jika tidak ada pengembangan yang berkelanjutan. C2 menilai bahwa keadilan dan pemerataan belum sepenuhnya terwujud karena kondisi fasilitas sekolah masih sangat memprihatinkan

4. Hambatan Relevansi: Tantangan dan Saran

Tantangan yang diungkapkan oleh informan mencakup keakuratan target dan integritas dalam proses seleksi (A1, B1, B2, C1, C2); mutu serta jumlah pendidik dan sarana (A1, A2, B2, B3, C2); keterbatasan jumlah institusi pendidikan (A1, A2, A3); kesinambungan dana dan potensi penyalahgunaan anggaran (A1, A2, C3); dan juga perlindungan bagi siswa di tempat tinggal asrama (C3). C3 dan A3 pun mengajukan prioritas untuk memperluas layanan ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Rekomendasi yang disampaikan meliputi pemantauan dan penilaian yang rutin (B1, B2, B3, C2), peningkatan kualitas pengajar, kurikulum, serta fasilitas (A1, A3, B2, B3, C2), keterbukaan dalam anggaran dan manfaat (C3), serta keberlangsungan program melalui kolaborasi dengan sekolah lain (A2) dan pendampingan bagi lulusan sampai ke jenjang perguruan tinggi (C2).

Tabel 1. Ringkasan Persepsi Mahasiswa terhadap Relevansi Program

Indikator	Persepsi Dominan	Catatan Kritis
Tujuan dan kebutuhan	Sesuai; biaya pendidikan dan kebutuhan dasar ditanggung.	Jumlah sekolah dan kapasitas terbatas.
Sasaran	Harus berbasis kondisi ekonomi dan transparan.	Data belum akurat, "orang dalam", pengakuan miskin palsu.
Hasil	Berpotensi menekan putus sekolah dan kesenjangan; sejalan dengan Sila Kelima.	Pelaksanaan lapangan belum teruji; rawan menjadi solusi sementara.
Hambatan	Kualitas guru dan fasilitas, anggaran, pengawasan.	Perlindungan siswa di asrama; prioritas wilayah 3T.

Copyright © 2026: Agnes Elizabeth Manalu, Nabila Devia Hummaira, Anisa Amelia Purba, Mikha Valdo Tambunan, Nur cahyu Azizah, Saqinah Aifi Kirmala, Chandra Fhutu Neva, & Sri Yunita.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembentukan Persepsi

Hasil wawancara menunjukkan empat faktor yang tampak memengaruhi persepsi informan.

1. Sumber informasi. Informan berbeda dalam cara memperoleh informasi tentang program. B1 menyatakan pengetahuannya berasal dari informasi di media sosial dan literatur di internet, dan mengakui belum mengetahui pelaksanaannya secara mendalam. B2 juga mengaku kurang mengetahui jalannya program karena program ini masih baru. Sebaliknya, C3 mengetahui keberadaan Sekolah Rakyat di dekat tempat tinggalnya, termasuk kecepatan pembangunan dan kondisi bangunannya, sehingga penilaiannya lebih konkret. C1 juga merujuk pada pembangunan sekolah di daerah terpencil.
2. Latar belakang keilmuan dan nilai konstitusional. Informan cenderung menilai program melalui kerangka konstitusi dan Pancasila. B2 menyebut dirinya menilai sebagai mahasiswa PPKn dan memandang pendidikan sebagai pemenuhan hak warga negara. C3 merujuk pada UUD 1945, sedangkan B2 dan C1 menggunakan Sila Kelima sebagai tolok ukur.
3. Pengalaman dan pengamatan lingkungan. Beberapa informan menilai berdasarkan apa yang mereka lihat. C2 menyatakan masih melihat banyak anak putus sekolah, fasilitas sekolah yang memprihatinkan, dan orang yang mengaku miskin padahal mampu. B2 menyebut banyaknya "orang dalam" di Indonesia sebagai sumber kekhawatiran terhadap seleksi. C3 mengamati terbatasnya sekolah di wilayah sekitar yang penduduk miskinnya banyak.
4. Ekspektasi dan harapan terhadap pemerintah. B1 menyatakan bahwa berdasarkan program sebelumnya, pengawasan masih kurang sehingga program ini perlu pengawasan dan evaluasi yang ketat. C1 menilai kondisi pendidikan di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan berharap program ini tidak mengesampingkan program lain yang penting. C3 menunjukkan kekhawatiran terhadap potensi korupsi dalam penyaluran dana dan menuntut transparansi.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn UNIMED berpendapat bahwa Program Sekolah Rakyat berhubungan erat dengan pemerataan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu, tetapi penilaian ini bersifat bersyarat. Konsep relevansi diakui dalam konteks tujuan, yaitu menyediakan pendidikan tanpa biaya, berbasis asrama, serta memenuhi kebutuhan dasar bagi siswa. Ini sejalan dengan desain program yang menargetkan siswa dari keluarga miskin pada desil 1 dan 2 DTSEN serta menjamin kebutuhan seperti tempat tinggal, makanan, dan seragam. Pendapat para informan bahwa program ini dibenarkan mampu mengurangi angka putus sekolah dan jurang kesenjangan juga mendukung harapan bahwa Sekolah Rakyat dapat meningkatkan keikutsertaan dalam pendidikan serta mencapai pendidikan yang inklusif dan adil secara sosial.

Namun, relevansi di tingkat tujuan tidak serta merta berarti relevansi dalam pelaksanaan. Para informan mempertanyakan keakuratan sasaran, jumlah sekolah yang memadai, kualitas guru, serta fasilitas yang tersedia, hingga pengelolaan anggaran. Karena itu, pandangan mahasiswa dapat dirangkum sebagai penerimaan positif terhadap sasaran program sekaligus seruan untuk akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Pola ini mirip dengan temuan Yanda dan rekan-rekannya (2026) yang menyatakan bahwa mahasiswa PPKn tetap bersikap kritis terhadap pelaksanaan, pengawasan, anggaran, akurasi sasaran, dan keberlanjutan inisiatif pemerintah meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hal tersebut.

Penting untuk menekankan hubungan antara data dan relevansi sasaran. Mengingat program ini menyasar keluarga dalam desil tertentu, kekhawatiran informan mengenai data yang tidak akurat dan proses seleksi yang tidak transparan menyentuh aspek penting dari akurasi sasaran. Informasi C3 bahwa calon siswa disurvei secara langsung di rumah memberikan kesan bahwa ada mekanisme verifikasi di lapangan, tetapi persepsi ini belum bisa digeneralisasi karena berasal dari satu sumber informasi.

Dalam konteks kaitannya dengan pemerataan, informan menganggap Sekolah Rakyat sebagai langkah awal yang krusial, bukan sebagai jalan keluar akhir. Catatan mengenai jumlah sekolah yang terbatas, kurangnya perhatian pada wilayah 3T, dan kemungkinan program ini menjadi solusi sementara menunjukkan bahwa pemerataan masih dianggap sebagai proses yang sedang berlangsung. Hal ini memperkuat tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 agar setiap individu, termasuk mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, dapat menikmati pendidikan yang berkualitas. Kekhawatiran narasumber mengenai mutu pengajar dan sarana yang tersedia juga sangat relevan, karena hak yang diberikan bukan hanya sebatas akses, tetapi juga mencakup pendidikan yang berkualitas.

1. Faktor-Faktor Pembentuk Persepsi Menurut Teori Bruner

Menurut Bruner (1957), persepsi merupakan proses aktif dan selektif: individu menginterpretasikan stimulus berdasarkan harapan, pengalaman, nilai, dan kebutuhannya. Persepsi dipengaruhi faktor struktural (informasi yang diterima) dan faktor fungsional (motivasi, emosi, dan pengalaman pribadi). Keempat faktor yang ditemukan dalam penelitian ini adalah;

1) Faktor struktural: sumber informasi. Perbedaan sumber informasi berkaitan dengan perbedaan kedalaman persepsi. Informan yang bergantung pada media sosial dan sumber daring (B1) cenderung memberikan penilaian pada tingkat konsep dan dengan jujur membatasi klaim yang mereka buat. Responden yang mengetahui program dari sekitar mereka (C3) menawarkan penilaian yang lebih rinci berkaitan dengan pembangunan, proses survei siswa calon, dan distribusi sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas serta kedekatan informasi mempengaruhi seberapa jelas persepsi terbentuk. Temuan ini juga menekankan perlunya komunikasi kebijakan yang transparan agar masyarakat, termasuk mahasiswa, memiliki informasi yang cukup untuk mengevaluasi program.
2) Faktor fungsional: latar belakang keilmuan dan nilai konstitusional. Sebagai mahasiswa PPKn, informan memiliki kerangka acuan berupa nilai kewarganegaraan, UUD 1945, dan Pancasila. Kerangka ini terlihat saat responden mengacu pada Sila Kelima dan amanat "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai patokan dalam menilai program. Ini mendukung argumen awal bahwa reaksi mahasiswa PPKn tidak semata-mata dipengaruhi oleh informasi objektif, tetapi juga oleh nilai-nilai kewarganegaraan yang dimiliki.
3) Faktor fungsional: pengalaman dan pengamatan lingkungan. Pandangan kritis informan, termasuk kekhawatiran mengenai "orang dalam", individu yang mengklaim miskin tetapi sebenarnya mampu, dan keadaan sekolah yang memprihatinkan, berasal dari pengalaman dan pengamatan sehari-hari mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Bruner yang menyatakan bahwa pengalaman

Copyright © 2026: Agnes Elizabeth Manalu, Nabila Devia Hummaira, Anisa Amelia Purba, Mikha Valdo Tambunan, Nur cahyu Azizah, Saqinah Aifi Kirmala, Chandra Fhutu Neva, & Sri Yunita.

memainkan peran dalam menyiapkan individu untuk memahami rangsangan baru. Informan tidak memberikan penilaian program dengan cara yang objektif, melainkan berdasarkan apa yang telah mereka saksikan mengenai praktik distribusi bantuan dan kondisi pendidikan yang ada di sekitarnya.

4) Faktor fungsional: ekspektasi terhadap pemerintah. Penekanan B1 pada pengawasan dengan mengacu pada program sebelumnya, serta kekhawatiran C3 mengenai penyalahgunaan dana, menunjukkan bahwa harapan dan kecurigaan yang muncul dari pengalaman dengan kebijakan publik mempengaruhi penilaian narasumber terhadap program yang baru. Oleh karena itu, pandangan terhadap Sekolah Rakyat tidak dapat dipisahkan dari keyakinan mahasiswa terhadap pengelolaan pemerintahan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, persepsi mahasiswa PPKn UNIMED terkait Sekolah Rakyat adalah hasil dari hubungan antara data yang mereka terima (aspek struktural) dan kerangka nilai, pengalaman, serta harapan mereka (aspek fungsional). Hubungan ini menghasilkan pandangan yang mendukung sasaran program tetapi menuntut adanya transparansi, pengawasan, dan keberlanjutan. Keterbatasan. Penelitian ini melibatkan sembilan informan, sehingga hasilnya tidak dimaksudkan untuk dijadikan umum. Beberapa informan juga mengungkapkan bahwa mereka belum mengetahui pelaksanaan program secara langsung, sehingga penilaian mereka sebaiknya dipahami sebagai pandangan, bukan evaluasi empiris mengenai efektivitas program.

Kekhawatiran yang diungkapkan oleh informan mengenai keterbatasan institusi pendidikan, kesinambungan dana, pengawasan, serta kemungkinan penyalahgunaan uang menunjukkan bahwa keberlangsungan menjadi aspek krusial dalam hal relevansi program. Sebuah program yang dapat memberikan keuntungan di awal namun tidak mampu menjaga pendanaan, kualitas pengajar, sarana, serta pengawasan berisiko menciptakan kesetaraan yang bersifat sementara. Oleh karena itu, menurut hasil penelitian ini, keberlanjutan Sekolah Rakyat harus dipahami tidak hanya sebagai kelangsungan keberadaan sekolah, tetapi juga sebagai kemampuan untuk mempertahankan akses, kualitas, ketepatan sasaran, dan akuntabilitas secara bersamaan. Dengan menggunakan kerangka tersebut, Program Sekolah Rakyat dapat dianggap sebagai salah satu alat untuk mencapai pemerataan, tetapi tetap memerlukan evaluasi rutin agar tidak terjebak pada pencapaian administratif semata.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa PPKn UNIMED percaya bahwa Program Sekolah Rakyat penting untuk mewujudkan pendidikan bagi keluarga miskin karena sejalan dengan UUD 1945 dan Sila Kelima Pancasila, dan dapat menekan jumlah putus sekolah dan meningkatkan aksesibilitas. Namun, penerimaan tidak tersebar luas. Program ini masih jauh dari harapan bagi sebagian siswa karena belum terbukti efektif di lapangan, fasilitas pendidikan masih buruk, dan banyak anak dari keluarga kurang mampu yang terus putus sekolah. Selain itu, mereka mempertanyakan kelangsungan program dan menganggapnya mungkin hanya solusi sementara. Seperti dijelaskan Bruner (1957), persepsi ini dibentuk oleh komponen struktural dan fungsional. Faktor-faktor ini termasuk perbedaan sumber informasi, latar belakang keilmuan PPKn, dan pengalaman pribadi mahasiswa yang memengaruhi kedalaman penilaiannya. Mahasiswa sangat khawatir tentang data penerima yang akurat, praktik orang dalam yang mungkin terlibat dalam

seleksi, kualitas guru dan fasilitas, dan penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah harus meningkatkan transparansi dan pengawasan, khususnya dalam proses pemilihan penerima dan dana. Mereka juga harus memperluas jangkauan sekolah di wilayah 3T dan meningkatkan kualitas guru dan sarana pendukung. Agar program tidak terbatas pada hasil administratif semata, saran ini harus diimbangi dengan evaluasi rutin yang melibatkan masyarakat. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk menunda perluasan program sampai tata kelola dan pengawasan benar-benar diperbaiki bagi mereka yang menganggap program ini tidak layak dilanjutkan dalam skala besar. Agar hasilnya lebih representatif, peneliti harus melibatkan lebih banyak informan yang beragam. Dengan menggunakan pendekatan Teori Bruner, yang masih jarang digunakan di Program Sekolah Rakyat, penelitian ini memberi kontribusi pada penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap kebijakan publik.

REFERENSI

Bruner, J. S. (1957). On Perceptual Readiness. *Journal TOC, 64*(2). https://psycnet.apa.org/record/1958-04908-001?doi=1

Daniel S, T., & Juhaeriah. (2025). Sekolah Rakyat Program Afirmasi Sekolah Bermutu Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman, 5*(3). https://jipkis.stai-dq.org/index.php/home/article/view/193

Hasanah, I. R. (2022). Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Journal Of Law, 5*(1). https://www.neliti.com/publications/557463/pelaksanaan-hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-di-dalam-bidang-pendidikan

Mahrowi, A. F. (2025). Polemik Pendidikan di Indonesia antara Hak Rakyat dan Tanggungjawab Negara. *Jurnal Dunia Pendidikan, 3*(1). https://jurnal.yayasanyutapendidikancerdas.com/index.php/educatum/article/view/231

Rahmadini, R. (2025). Pengaruh Aspek Psikologis Terhadap Efektivitas Komunikasi: Tinjauan Psikologi Komunikasi. *Journal of Islamic Communication & Broadcasting, 5*(2). https://rumahjurnal.iainsasbabel.ac.id/KPI/article/download/5973/2293

Rahmawati, L. K., Daryono, & Firmansyah, M. B. (2026). Peran Sekolah Rakyat dalam Pemerataan Akses Pendidikan bagi Keluarga Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Jember: Sebuah Studi Kualitatif. *Journal Education Research and Development, 10*(1). https://jurnal.unipar.ac.id/index.php/ej/article/download/2828/2357

Sari, M. A., Permadi, R. N., Sandiza, T. M., & Sartika, D. (2025). Sekolah Rakyat : Menjawab Tantangan, Mewujudkan Harapan. *Suara Analis Kebijakan, 3*(3). dari https://sajak.lan.go.id/article/view/87

Sulubara, S. M., Basri, T. S., & Iskandar. (2024). Analisis Konstitusional terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Kabar Masyarakat, 2*(4). https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JKB/article/view/2653

Widyaningtyas, M. N., & Subroto, M. (2023). Analisis Yuridis terhadap Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 12*(2). https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/19544

Wiratomo, G. H., & dkk. (2025). PersepsiMahasiswa GenerasiZ Terhadap Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Universitas Negeri Semarang. *Integralistik*, 15-23. https://doi.org/10.15294/1f31t248

Yanda, R. D., & dkk. (2026). Persepsi mahasiswa PPKn Universitas Negeri Padang terhadap Program Pemerintah Makan Bergizi Gratis. *Journal of Education, Cultural and Politics, 6*(3). https://jecco.ppj.unp.ac.id/index.php/jecco/article/view/861/351

Zalmi, P. O., & Montessor, M. (2022). Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dan Budaya Sekolah Dalam Mengembangkan Nilai Civic Disposition Siswa Di SMPN Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 9-22. https://doi.org/10.21831/jppfa.v10i1.45549.

Copyright © 2026: Agnes Elizabeth Manalu, Nabila Devia Hummaira, Anisa Amelia Purba, Mikha Valdo Tambunan, Nur cahyu Azizah, Saqinah Aifi Kirmala, Chandra Fhutu Neva, & Sri Yunita.